

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Achmad Ali, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Jakarta, Watampone.

_____. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta, Kencana.

Adam Chazawi, 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing.

Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Crews, G. Dan Gillespie. 2004. *W.A brief history of corrections in America*. lihat dalam. Stanko, S. Gillespie, W. & Crews, G. *Living in Prison; A History of the correctional system with an insider's View*, Greenwood Press, Westport CT.

Djoko Prakoso, 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Evi Hartanti, 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed.2. Sinar Grafika, Jakarta.

Hadari Djenawi Tahir, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ibnu Hajar, 2004. *Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, Al-Mawarid Edisi XII

Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan.

- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Makassar, Mitra Buana Media.
- Kusumah M.W, 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Marbun BN, 2004. *Kamus Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria Avalia, 2014. *Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persengkongkolan Tender*, Jurnal ilmiah
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa.
- Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya, Fakultas Hukum Unair.
- Pradipyo Rinawan, 2009. *Korupsi di indonesia, perspektif ilmu ekonomi. Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Pres.
- Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung
- _____ 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, Bandung).

_____. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., 2019, *"Modul Penuntutan"*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Lain-lain

Christian Evert, Pola dan Indikasi Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 12.41 Wita.

Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit: Kejaksaan Agung R.I.

Jerry Indrawan, Dkk, 2020. *“Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah”* Jurnal Transformative, Vol. 6 No. 2.

Maria Avalia, 2014. *Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persengkongkolan Tender*, Jurnal ilmiah.

Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Taufiequrachman Ruki, “Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kepentingan Pemerintah”, Makalah pada Seminar Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPK dan KPPU pada tanggal 23 Agustus 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Visi Jokowi Untuk Indonesia, diakses dari <https://www.kompas.com/> Pada tanggal 11 juni 2023, pukul 16.10 Wita.

Website, <https://disperin.ntbprov.go.id/>. Di akses pada pukul 10.15 Wita tanggal 10 juni 2023.